

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Asikin, Z., Wahab, A., Husni, L., dan Asyhadie, Z., 2010, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Kencana, Jakarta.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, 2018, *Profil Data Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2018*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Serang.
- Djodjowadono, Soempomo, 2007, *Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Djumialdji, F.X., 1997, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Haspels, Nelien, Tim de Meyer, dan Marja Paavilainen, 2012, *Kesetaraan dan Non Diskriminasi di Tempat Kerja di Indonesia*, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Koesparmono, Irsan, dan Armansyah, 2016, *Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo, Handri, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Buku Kita, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembiring, Jimmy Joses, 2016, *Hak dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Peraturan Terpadu*, Visimedia, Jakarta.
- S.F.Marbun, 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sjaifudin, Hetifah 2002, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Ford Foundation, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, Iman., 1975, *Hukum Perburuahan bidang Kesehatan Kerja*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1990, *Hukum Perburuahan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Sujamto, 1983, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suparno, Erman, 2009, *National Manpower Strategy (Strategi Ketenagakerjaan Nasional) Sebuah Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif Global*, Kompas, Jakarta.
- Suratman, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Indeks, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006, *Ilmu Administasi Publik*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R., Ridwan, H., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Winardi, 1993, *Asas-asas Administrasi Bisnis*, Mandar Maju, Bandung.

### Artikel Jurnal

- Yusrina, Arifa dan Shrimarti Rukmini Devy, “Faktor yang Mempengaruhi Niat Ibu Memberikan ASI Eksklusif di Kelurahan Magersari, Sidoarjo”, *Promkes*, Vol. 4, No.1, Juli 2016.
- Darma, Susilo Andi, “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat”, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017.
- Fadila, Alfianita, “Pengaruh Dismenore terhadap Aktivitas Fisik”, *Kesehatan dan Agromedicine*, Vol.2, No.3, Agustus 2015.
- Nurdiani, Nina, 2014, “Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan”, *Journal Binus*, Vol. 5, No.2, Desember 2014.

Rachmat, Suliati, “Beberapa Perlindungan Hukum Khusus Bagi Buruh Wanita”, *Hukum dan Pembangunan*, Vol. 18, No.4, 1988.

Shalihah, Fithriatus, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Selat*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2016.

Suradi, Rulina, “Spesifitas Biologis Air Susu Ibu”, *Sari Pediatri*, Vol. 3, No 3, Desember 2001.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang *Burgelijk Wetboek Voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan The ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Masuk Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan The ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 81 Concering Labour Inspection in Industri and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5291).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33/Men/2003 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.16/Men/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 710).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1753).

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 64).

Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).

### **Hasil Penelitian**

Ardiansyah, Fahmi, 2016, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan di PT Madubaru Yogyakarta*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Dewi, Murti Pramuwardhani, 2014, *Tinjauan Yuridis Hak Menyusui di Tempat Kerja bagi Pekerja Perempuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang*

*Ketenagakerjaan*, Laporan Hasil Penelitian, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Fithrah, Afif Fairuz, 2017, *Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Wanita yang Bekerja di Indomaret di Kabupaten Sleman oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans DIY Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pangestika, Elza Qorina, 2014, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Pada Malam Hari di Liquid Café Next Generation Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **Internet**

Badan Pusat Statistik, “Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin 2015-2018”,  
<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/16/1313/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin-2015-2018.html>, diakses 7 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, “Angkatan Kerja Perempuan Menurut Golongan Umur di Kabupaten Serang 2015”,  
<https://serangkab.bps.go.id/dynamictable/2016/11/02/106/angkatan-kerja-perempuan-menurut-golongan-umur-di-kabupaten-serang-2015.html>, diakses 8 Februari 2020.

Dewi Kania, “Pentingnya Perempuan Ambil Hak Cuti Haid Setiap Bulan”,  
<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/11/26/481/1983023/pentingnya-perempuan-ambil-hak-cuti-haid-setiap-bulan>, diakses 13 Januari 2020.

### **Lain-lain**

Hasil wawancara dengan Bapak Jarman Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, tanggal 1 Oktober 2019 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ely selaku Manajemen PT Nikomas Gemilang, tanggal 29 Maret 2019 di Gedung Utama Nikomas.

Hasil Wawancara dengan Pekerja Perempuan di Nikomas, tanggal 15 Mei 2019, di Kantor DPC Kabupaten Serang.

Hasil Wawancara dengan Pengurus SPN Nikomas, tanggal 20 Maret 2019 di Kantor DPC SPN Serang.